

**ANALISIS AKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DESA RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2019**

SURYA AKBAR

Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Indragiri
Jl. Azki Aris, Rengat. Kode Pos 29318. Telp. (0769) 22458

Abstrak :

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang pemetaan aktor yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat tepatnya di Desa Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir. Penetapan suatu kebijakan yang mengikat di lingkungan masyarakat tentunya dihasilkan melalui gagasan dan legitimasi para aktor yang ada, baik itu dari Pemerintahan Desa maupun aktor yang berasal dari luar instansi pemerintahan namun memiliki akses, kekuatan dan kepentingan untuk turut mempengaruhi arah penetapan sebuah kebijakan. Melalui penelitian ini akan dijelaskan identifikasi masing-masing aktor tersebut serta mengukur derajat kekuatan dan kepentingan mereka dalam memberikan pengaruh pada arah kebijakan publik di lingkungan desa Rantau Bais. Penelitian ini juga mengidentifikasi pola hubungan antar aktor secara lebih luas melalui skema hubungan dalam jaringan struktural organisasi pemerintah desa dan hubungan organisasi pemerintahan desa dengan aktor maupun kelompok masyarakat diluar jaringan struktural. Pentingnya suatu kajian tentang hubungan antar aktor ini memberikan penjelasan kepada kita tentang sejauh mana hubungan yang terjalin antara masing-masing aktor dalam hubungan yang harmonis atau konflik tersembunyi karena pada dasarnya penetapan suatu kebijakan yang akan dibuat dan diterapkan berdampak kepada keseluruhan masyarakat oleh karena itu kebijakan tersebut haruslah memiliki manfaat dan bukan kebijakan yang hanya mengutamakan kepentingan personal maupun kelompok belaka. Kebijakan yang berkualitas dan memiliki manfaat dapat dihasilkan dari para aktor yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang saling seimbang tidak saling mendominasi dan memobilisasi.

Kata Kunci : Penelitian, Rantau Bais, Aktor, Kebijakan Publik, Struktural, Kekuatan dan Kepentingan

Abstract :

This research is a scientific study that explains the monitoring of actors who have interactions with the community in Rantau Bais Village, Rokan Hilir Regency. Determination of a binding policy in the community certainly results from the ideas and legitimacy of the existing actors, both from the Village Government and actors who come from outside government agencies but have access, power and interests to participate in influencing the direction of setting a policy. Through this research, it will be explained the identification of each of these actors as well as measuring the degree of their power and interests in influencing the direction of public policy in the village of Rantau Bais. This

study also identifies patterns of relations between actors more broadly through the scheme of relationships in the structural network of village government organizations and the relationship of village government organizations to actors and community groups outside the structural network. The importance of a study of the relationship between actors provides an explanation for us about the extent to which the relationship exists between each actor in a harmonious relationship or hidden conflict because basically the determination of a policy that will be made and implemented has an impact on the whole community because of that policy must have benefits and not policies that only prioritize personal or group interests. Quality policies that have benefits can be produced from actors who have balanced strengths and interests who do not dominate and mobilize each other.

Keyword : Research, Rantau Bais, Actor, Public Policy, Structural, Strength and Interest

I. Pendahuluan

Menurut William N. Dunn (2003:132) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebuah *list* pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.

Disamping itu, Riant Nugroho (2012:120) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah dan itu merupakan suatu pilihan. Selanjutnya, Islamy (2000) memberikan penjelasan mengenai tahapan pengambilan kebijakan, yakni :

1. Perumusan masalah

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan.

2. Penyusunan Agenda Kebijakan

Dari sekian banyak masalah publik yang telah diidentifikasi, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana

yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Pemilihan alternatif kebijakan meliputi kegiatan :

- a. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah.
- b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya.
- c. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing.
- d. Memilih alternatif yang memuaskan.

4. Pengesahan Kebijakan

Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima

(*comforming to recognized principles or accepted standards*).

Hal senada yang disampaikan oleh *Riant Nugroho* hampir tidak jauh berbeda dengan pemahaman yang disampaikan *Dunn* mengenai kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan untuk dapat berbuat atau tidak berbuat yang menjadi pilihan pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan berbagai ragam alternatif yang ada. Selain itu, dari beragam tahap dan proses penetapan suatu kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli cukup memungkinkan bagi para aktor dan kelompok kepentingan lainnya untuk turut memberikan masukan dan pengaruh mereka terhadap arah suatu kebijakan.

Kemungkinan bagi para aktor dan kelompok kepentingan lainnya dalam memberikan pengaruh kepada kebijakan ini dikuatkan dengan adanya nilai-nilai yang dapat mempengaruhi tindakan para pembuat kebijakan menurut *Wibawa* (2002), yakni :

1. Nilai Politik
Dimana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai Pribadi
Dimana seringkali keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan dan sebagainya.
3. Nilai Ideologi
Dimana nilai ideologi seperti misalnya nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.
4. Nilai Organisasi
Dalam hal ini keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*) dan sanksi (*sanction*).
5. Nilai Kebijakan

Dalam hal ini keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijakan yang secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya *Islamy* (1991) menjelaskan tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan suatu kebijakan, yakni :

1. Tekanan dari luar
2. Kebiasaan lama
3. Sifat pribadi pembuatan kebijakan
4. Pengaruh kelompok luar
5. Pengaruh keadaan masa lalu

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh *Islamy* di atas kembali lagi dapat memberikan penekanan kepada kita bahwa kemungkinan besar suatu kebijakan publik yang dibuat oleh para pembuat kebijakan bisa dipengaruhi oleh aktor-aktor maupun kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat.

Suatu kebijakan dibuat pada umumnya untuk mengatasi suatu persoalan tertentu maupun mengantisipasi kemungkinan terjadinya distorsi di kalangan masyarakat, untuk itu tidak ada prinsip kebetulan dalam suatu kebijakan publik, segala sesuatunya haruslah direncanakan meskipun alternatif-alternatif yang dihasilkan berasal dari berbagai kemungkinan yang ada termasuk dari akto-aktor dan kelompok-kelompok masyarakat karena prinsipnya adalah tujuan kebijakan publik adalah :

1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
2. Melindungi hak-hak masyarakat.
3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut maka kebijakan yang dibuat berasal dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat, namun legitimasinya oleh pihak yang berwenang.

Ada ragam kebijakan publik yang dapat dihasilkan oleh pemerintah, menurut *Gabriel A Almond* dan *G. Bingham Powell* (1966) kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, yakni :

1. Kebijakan Publik dalam hal penarikan sumber daya manusia (*extractions*)

Mengacu pada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ditarik dari sistem politik masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, wajib militer dan sebagainya. Penarikan sumber daya ini adalah biaya yang dipikul oleh masyarakat dalam rangka menghidupkan negaranya.

2. Kebijakan publik dalam hal pengaturan (*regulations*)

Mengacu pada berbagai bentuk pengaturan pemerintah agar tata kehidupan pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tingkat harmonisasi.

3. Kebijakan publik dalam hal pembagian (*allocations*)

Artinya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk melakukan distribusi biaya, barang, pelayanan, kehormatan, status penghargaan, kesempatan kepada masyarakat.

4. Kebijakan publik dalam hal pengaturan lambang (*symbols*)

Artinya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur secara khusus tentang penetapan simbol dan lambang kesetiaan kepada negara.

Selain itu, kebijakan publik juga memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat

dipahami melalui pemaparan menurut *Solichin Abdul Wahab* (2008), berikut ini:

1. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik pada umumnya bukanlah merupakan suatu tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang telah direncanakan.
2. Pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, yang dimana tindakan-tindakan ini dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan memiliki kaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit. misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga berbentuk negatif.
 - Dalam bentuk positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah tertentu.
 - Sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan publik kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak

melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah dimana campur tangan pemerintah justru sangat diperlukan.

Kebijakan publik ini sendiri pada umumnya dihasilkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan keberadaannya mengikat orang banyak karena dilegitimasi oleh pihak yang memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam hal ini Pemerintahan Desa merupakan salah satu organisasi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan yang dapat mengikat seluruh masyarakat di lingkungan desa tersebut.

Penelitian ini mengarah pada suatu desa yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih yakni Desa Rantau Bais, dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat, menganalisa selanjutnya mampu mengidentifikasi aktor-aktor yang ada di desa tersebut, baik aktor yang terlihat maupun tidak, aktor utama yang berasal dari kalangan pemerintahan desa maupun aktor lainnya yang berasal dari luar pemerintahan desa. Penelitian ini berguna untuk melihat dan mengetahui pengaruh aktor-aktor tersebut setelah diidentifikasi dalam hal penetapan sebuah kebijakan yang ada dan mengikat khususnya masyarakat desa rantau bais.

Untuk itu, obyektivitas penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang keberadaan aktor-aktor tersebut serta pengaruh yang mereka miliki dalam studi analisis aktor.

I. a. Gambaran Umum Wilayah

I.a.1. Kecamatan Tanah Putih

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kecamatan induk pada saat pembentukan Kabupaten Rokan Hilir tahun 1999, berbatasan dengan

Kecamatan Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rimba Melintang, Rantau Kopar dan Bangko Pusako, Kecamatan Tanah Putih juga berbatasan langsung dengan Kabupaten / Kota lain yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

Kecamatan Tanah Putih mempunyai luas 1.915,23 Km² atau sekitar 21,56 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas. Ibu kota Kecamatan Tanah Putih terletak di Kelurahan Sedinginan. Kondisi geografis Kecamatan Tanah Putih merupakan daerah aliran sungai yang dilewati sungai Rokan yang panjangnya sekitar 350 Km, sungai ini sangat berguna bagi masyarakat baik sebagai tempat mata pencaharian menangkap ikan maupun sebagai sarana transportasi.

Kecamatan Tanah Putih terdiri dari delapan belas (18) desa/kelurahan, Tiga (3) keluarahandan lima belas (15) desa. Tiga kelurahan diantaranya yaitu Kelurahan Sedinginan dan Kelurahan Banjar XII dan Kelurahan Cempedak Rahuk, sedangkan lima belas desa diantaranya yaitu Desa Putat, Sekeladi, Sintong, Teluk Mega, Rantau Bais, Ujung Tanjung, Mumugo, Teluk Berembun, Menggala Sakti, Menggala Sempurna, Sekeladi Hilir, Sintong Makmur, Sintong Bakti, dan Desa Sintong Pusaka,serta Menggala Teladan.

Kecamatan Tanah Putih dengan 18 desa/kelurahan terbagi menjadi 173 RW dan 349 RT. Desa dengan jarak terjauh antara ibukota desa/kelurahan ke ibukota kecamatan adalah Desa Menggala Teladan dengan jarak 67 km, kemudian diikuti Desa Rantau Bais dengan jarak 60 km. Sedangkan jarak desa/kelurahan yang terdekat dengan ibukota Kecamatan Tanah Putih adalah Kelurahan Sedinginan dengan jarak 1 km.

Jumlah penduduk Kecamatan Tanah Putih pada Tahun 2017 menurut data BPS Kabupaten Rokan Hilir adalah 65.620 jiwa yang terdiri dari 33.109 laki-laki (jiwa) dan 32.511 perempuan (jiwa) dengan 17.556 rumah tangga. Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Desa Ujung Tanjung dengan jumlah penduduk 10.086 jiwa atau dengan persentase 15,37 persen diikuti Desa Manggala Sakti dengan jumlah penduduk 7.839 jiwa atau dengan persentase 11,95 persen. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Desa Putat dengan 905 jiwa atau 1,38 persen dari total penduduk Kecamatan Tanah Putih.

Desa Manggala Sakti merupakan desa paling padat penduduknya di Kecamatan Tanah Putih dengan kepadatan penduduk mencapai 162 jiwa/Km², kemudian diikuti dengan Desa Sintong yaitu mencapai 153 jiwa/Km². Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Desa Putat dengan kepadatan penduduk 4 jiwa/Km².

a. Pendidikan

Pada Tahun 2017 Kecamatan Tanah Putih memiliki sarana pendidikan negeri dan swasta yaitu 46 unit sekolah TK, 52 unit Sekolah Dasar, 22 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 9 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) serta 5 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta biaya yang terjangkau merupakan hal yang penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Di Kecamatan Tanah Putih sudah terdapat sarana kesehatan berupa Rumah Sakit sebanyak 2 unit, Rumah Bersalin

sebanyak 1 unit, Balai Pengobatan/Poliklinik sebanyak 8 unit, Puskesmas sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 8 unit, Tempat Praktek Dokter sebanyak 11 unit, Tempat Praktek Bidan sebanyak 43 unit, terdapat juga Poskesdes sebanyak 1 unit, Polindes sebanyak 18 unit, serta Posyandu sebanyak 52 unit. Untuk tenaga kesehatan, di Kecamatan Tanah Putih terdapat 23 orang dokter yang rata-rata bertugas di Desa Ujung Tanjung. Sedangkan bidan berjumlah 109 orang yang tersebar di semua desa/ kelurahan.

Alokasi bidan terbanyak di Kelurahan Sedinginan yaitu 23 orang, kemudian diikuti dengan Desa Rantau Bais yaitu 15 orang. Jumlah tenaga perawat/tenaga kesehatan lainnya tercatat sebanyak 97 orang. Sebanyak 20 perawat bertugas di Desa Rantau Bais.

c. Perekonomian

Hampir dua puluh lima persen perekonomian Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari kategori sektor pertanian, sehingga pembangunan bidang ekonomi dititikberatkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor perdagangan serta sektor lainnya. Begitu juga dengan Kecamatan Tanah Putih. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan di Kecamatan Tanah Putih Tahun 2017 yaitu sektor pertanian. Sebanyak 76,87 persen jumlah keluarga berusaha di sektor pertanian.

Kabupaten Rokan Hilir adalah termasuk penghasil perkebunan yang besar. Begitu juga Kecamatan Tanah Putih, kelapa sawit merupakan komoditas paling banyak produksinya. Total luas tanaman kelapa sawit mencapai 19.751,00 Ha yang menghasilkan 53.903,08 ton CPO. Sedangkan tanaman karet seluas 5.982,00 Ha menghasilkan

4.561,92 ton karet. Kelapa dengan luas 19,50 Ha menghasilkan 14,99 ton, dan pinang dengan luas 3,75 Ha menghasilkan biji kering mencapai 0,72 ton.

Kecamatan Tanah Putih memang tidak termasuk daerah potensi pertanian tanaman pangan maupun palawija karena lahan di Kecamatan Tanah Putih hampir seluruhnya adalah lahan kering bukan lahan sawah. Pertanian tanaman pangan yang dihasilkan adalah kacang tanah, ketela rambat, jagung serta ketela pohon. Pada Tahun 2015 Kecamatan Tanah Putih merupakan satu dari dua kecamatan yang menghasilkan tanaman pangan jenis kacang tanah. Luas panen kacang tanah mencapai 2 Ha dengan produksi mencapai 2 ton. Sedangkan luas panen ketela pohon mencapai 2 Ha dengan produksi ketela pohon mencapai 50 ton.

Tanaman pangan lainnya adalah dan ketela rambat dengan luas panen 2 Ha dan produksi sebanyak 16 ton. Sedangkan Tahun 2017 luas panen jagung mencapai 9 Ha dengan produksi mencapai 14 ton dan tanaman ketela pohon mencapai 3 Ha dengan produksi mencapai 84 ton.

Kecamatan Tanah Putih cukup banyak usaha peternakannya. Jumlah sapi tahun 2017 mencapai 788 ekor, kambing dan domba 835 ekor, ayam buras/kampung sebanyak 50.524 ekor dan itik sebanyak 538 ekor. Sedangkan pada tahun 2015, Jumlah sapi mencapai 753 ekor, kerbau 79 ekor, kambing dan domba 686 ekor. Selain itu juga terdapat peternak / usaha ayam buras/kampung mencapai 15.225 ekor, ayam ras 12.400 ekor dan 515 ekor itik. Populasi ternak kerbau paling banyak di Rokan Hilir ada di Kecamatan Tanah Putih.

Selain sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan, satu

lagi sektor yang cukup banyak dijadikan mata pencaharian penduduk Kecamatan Tanah Putih adalah sektor perikanan. Sebagai kecamatan yang dilewati sungai besar yaitu sungai Rokan Kecamatan Tanah Putih juga menghasilkan produk perikanan. Pada Tahun 2017, produksi perikanan umum mencapai 318 ton, produksi perikanan laut mencapai 170,24 ton, produksi budidaya kolam mencapai 152,16 ton dan produksi budidaya keramba mencapai 8,20 ton.

Tahun 2017, Kecamatan Tanah Putih telah memiliki 10 unit bank, 1 unit Koperasi Indrusi Kecil dan KR (Kopinkra), 14 unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP), 28 unit koperasi berbentuk lainnya, 8 unit mini market, 11 unit pasar yang tersebar hampir di seluruh desa/kelurahan, jumlah warung kelontongan yang cukup banyak yaitu 1.100 unit serta jumlah toko/kios/warung/kedai makan yaitu 337 unit. Selain dari pada itu juga terdapat jumlah hotel/penginapan yaitu sebanyak 6 unit. Sementara restoran atau rumah makan belum ada di Kecamatan Tanah Putih. Semakin banyaknya unit usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kecamatan Tanah Putih.

1.a.2. Desa Rantau Bais

Rantau Bais merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih. Secara orbitasi Desa Rantau Bais, jarak desa ke ibukota kecamatan berjarak 60 Km. Jarak desa ke ibukota Kabupaten Rokan Hilir sejauh 100 Km dan jarak desa ke ibukota Provinsi sekitar 153 Km. Berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat serta pengakuan dari aparat pemerintahan desa, Desa Rantau Bais lebih dikenal dengan sebutan Kepenghuluan Rantau Bais.

Desa Rantau Bais mempunyai luas wilayah 391,53 Km² yang mencakup 4 (empat) lingkungan/dusun, 8RW dan 22 RT dengan jumlah penduduk 4.372 jiwa. Secara geografis Desa Rantau Bais berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di sekitarnya, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kota Dumai.
- Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Teluk Mega, Desa Sintong.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Rantau Kopar.

Selain itu, wilayah Desa Rantau Bais merupakan daerah daratan rendah/hamparan dan daerah aliran sungai yaitu Sungai Rokan dengan 6-10 m ketinggian dari permukaan laut. Desa Rantau Bais beriklim tropis dengan banyaknya curah hujan mencapai 2.710 MM/Tahun.

a. Kependudukan Desa Rantau Bais

Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah penduduk Desa Rantau Bais mencapai 4.372 jiwa yang terdiri dari 2.175 jiwa Laki-laki dan 2.197 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.370 KK. Tingkat kepadatan pendudukan 11 jiwa/Km². Selain itu, jumlah rata-rata jiwa per-rumah tangga sebanyak 3 jiwa. Kategori penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Rantau Bais dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Rantau Bais

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Org)
1.	PNS	16

2.	Wiraswasta	27
3.	Pedagang	150
4.	Petani	420
5.	TNI dan Polri	2
6.	Karyawan Swasta	142
7.	Lain-Lain	304
8.	Belum Bekerja	60
Jumlah		1.121

Sumber : Data olahan Profil Desa Rantau Bais 2017

Penggolongan penduduk menurut pendidikan dapat dilihat melalui uraian berikut ini :

Tabel 2. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Rantau Bais

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Org)
1.	Belum Tamat SD	423
2.	Tamat SD	387
3.	Tamat SLTP/ Sederajat	165
4.	Tamat SLTA/ Sederajat	467
5.	TNI dan Polri	2
6.	Tingkat Akademi/ Perguruan Tinggi	60
Total		1.502

Sumber : Data olahan Profil Desa Rantau Bais 2017

Sedangkan, untuk penggolongan penduduk menurut Agama di Desa Rantau Bais terdiri dari Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

b. Kesehatan

Berdasarkan data tahun 2017 untuk sarana kesehatan di Desa Rantau Bais saat ini memiliki 1 (satu) unit Puskesmas Pembantu dan 1 (satu) unit

Poskesdes. Disamping Puskesmas tersebut juga terdapat 4 (empat) unit Posyandu dan 2 (dua) unit Tempat Praktek Bidan. Kondisi sarana prasarana cukup memadai dan efektif untuk digunakan sebagai pelayanan kesehatan.

c. Keagamaan

Sarana Agama di Desa Rantau Bais dapat dilihat dari bangunan-bangunan tempat ibadah bagi masyarakat berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang mereka anut. Jumlah mesjid sebanyak 6 (enam) unit Mesjid, 6 (enam) unit Mushalla/Surau dan 2 (dua) unit Gereja. Selain itu, masyarakat di Desa Rantau Bais juga memiliki beberapa kelompok pengajian yakni Ikatan Wirid Yasin Ibu-ibu, Ikatan Wirid Yasin Bapak-bapak dan Ikatan Remaja-Remaji Mesjid. Secara Khusus memiliki tempat perwiran yaitu Rumah Perwiran Desa Rantau Bais.

d. Pendidikan

Apabila dilihat dari sarana pendidikan umum maka saat ini Desa Rantau Bais sendiri memiliki 1 (satu) unit TK, 3 (tiga) unit SD, 1 (satu) unit SLTP dan 1 (satu) unit SLTA/SMK. Selain itu, Desa Rantau Bais juga memiliki sarana pendidikan agama yaitu 1 (satu) unit Madrasah Diniyah (MDA/PDT).

e. Perekonomian

Sumber pendapatan sebagian besar penduduk Desa Rantau Bais yaitu sektor pertanian. Jumlah keluarga/KK pertanian sebanyak 1.028 KK atau 75,04 persen dari jumlah keseluruhan keluarga rumah tangga yaitu 1.370 KK. Berdasarkan hasil data wawancara dengan pihak aparat Desa Rantau Bais. *Nurais* dan *Taslim* (Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) pada tanggal 22 November 2018, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Rantau Bais adalah sebagai petani yang terdiri

dari petani kelapa sawit sebanyak 85 % dan sisanya bekerja disektor lain seperti buruh, karyawan swasta, PNS, pedagang dll.

Jumlah industri kecil mikro dan dan rumah tangga di Desa Rantau Bais terdiri dari 3 (tiga) kelompok bergerak dibidang kayu, 4 (empat) kelompok bergerak dibidang anyaman dan 5 (lima) kelompok bergerak dibidang makanan.

f. Perumahan

Jumlah rumah tempat tinggal masyarakat menurut kualitas rumah di Desa Rantau Bais terdiri dari Rumah Permanen sebanyak 685 KK, Rumah Semi Permanen sebanyak 55 KK dan Rumah Bukan Permanen sebanyak 630 KK.

Jumlah keluarga menurut kondisi atap di Desa Rantau Bais secara keseluruhan menggunakan Seng/Asbes. Adapun rinciannya antara lain 0 KK beratap Genteng dan Beton serta 1.370 KK beratap Seng/Asbes. Jumlah keluarga menurut kondisi lantai rumah antara lain adalah 603 KK memiliki Lantai Keramik, 137 KK memiliki Lantai Semen dan 630 KK memiliki Lantai Kayu/Papan. Jadi, sebagian besar lebih banyak kondisi lantai rumah masyarakat menggunakan kayu/papan.

Jumlah keluarga menurut sumber penerangan utama atau penggunaan listrik di Desa Rantau Bais antara lain 1.259 KK menggunakan Listrik PLN, 70 KK menggunakan Listrik Non PLN, dan 41 KK dalam kondisi tanpa listrik, sedangkan jumlah keluarga menurut penggunaan bahan bakar utama untuk memasak terdiri dari 1.343 KK menggunakan Gas LPG/Listrik dan 27 KK menggunakan bahan bakar kayu.

g. Air bersih

Jumlah keluarga menurut sumber air minum di Desa Rantau Bais antara

lain adalah 1.302 KK mengkonsumsi Air Isi Ulang/ Kemasan dan 68 KK mengkonsumsi air minum dari Sumur. Dengan demikian rata-rata sebagian besar warga menggunakan air isi ulang/kemasan untuk keperluan sehari-hari.

Jumlah keluarga menurut jenis jamban/tempat buang air besar di Desa Rantau Bais antara lain adalah 1.362 KK memiliki Jamban Sendiri dan 8KK menggunakan Jamban Bersama. Dengan demikian sebagian besar keluarga rumah tangga sudah memiliki jamban/tempat buang air bersih sendiri dirumah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data serta proses investigasi dari data yang diperoleh. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Metode penelitian menurut Sugiyono (2014 : 2) adalah cara ilmiah yang ditempuh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu, penentuan metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah dirasakan sangatlah penting agar suatu karya ilmiah yang dihasilkan lebih terarah dan berkualitas.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas dan mendalam terhadap suatu fenomena dan permasalahan yang peneliti angkat dalam tulisan ini, seperti yang dijelaskan oleh Kriyantono (2006) bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

II.a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat suatu penelitian maka seorang peneliti harus menentukan instrumen yang bisa digunakan dalam pengumpulan informasi atau data yang dibutuhkan, hal ini perlu dilakukan agar pekerjaan meneliti lebih terarah dan terukur dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010 : 265) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi langsung ke tempat penelitian untuk memahami lingkungan tempat penelitian dibuat.
2. Wawancara
Peneliti langsung melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa aktor yang sudah ditentukan.
3. Triangulasi

Teknik triangulasi juga peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menggabungkan semua teknik pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data yang peneliti peroleh di lapangan.

4. Dokumen

Peneliti juga memperoleh data dari teknik pengumpulan data dokumen melalui dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian seperti dokumentasi, profil desa dan lainnya.

Untuk data penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan dua kelompok data, yakni :

1. Data Primer

Merupakan bentuk data yang peneliti peroleh langsung dari tempat penelitian seperti data wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung seperti arsip dan dokumen-dokumen pendukung seperti profil desa yang memuat gambaran umum wilayah penelitian, struktur organisasi pemerintahan desa dan lainnya.

III. PEMBAHASAN

Setelah berakhirnya masa orde baru maka ditetapkanlah UU Republik Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Jenis Pemerintahan yang memiliki kewenangan otonomi daerah ini awal mulanya diatur melalui UU RI No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU RI No. 32 Tahun 2004 lalu direvisi kembali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 dan yang terbaru adalah UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 ini maka lingkup pemerintah meliputi :

1. Pemerintah yang merujuk kepada pemerintah pusat.
2. Pemerintah Daerah yang merujuk kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota.
3. Pemerintah Desa.

Ditingkat daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU RI No. 23 Tahun 2004 memberikan definisi tentang otonomi daerah, yakni :

“Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Desa sekalipun juga memiliki suatu wilayah dan memiliki hak untuk mengurus serta mengelolah seluruh kompetensi dan sumber daya yang ada di wilayah mereka sendiri, selagi kegiatan tersebut bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Meningkatkan Pelayanan Umum.
- c. Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Hal-hal yang dimaksudkan di atas merupakan tujuan diselenggarakannya otonomi daerah pada tingkat daerah maupun desa.

Berdasarkan ketentuan dari UU yang sama dijelaskan bahwa :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal inilah kemudian ada suatu jaminan bagi Pemerintahan Desa untuk membuat aturan dalam bentuk peraturan yang mengikat seluruh masyarakat pada desa tersebut yang itu merupakan suatu kebijakan publik.

Kepala Desa merupakan aktor utama dalam melegitimasi kebijakan publik kalau kita mengarah kepada kebijakan atau peraturan ditingkat desa, namun perlu dipahami bahwa kepala desa bukanlah satu-satunya aktor yang memiliki kepentingan dalam penetapan suatu kebijakan. Faktanya ada beragam aktor yang tersembunyi maupun yang tampak yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam mempengaruhi penetapan suatu kebijakan.

III.a. Pemetaan Aktor Desa Rantau Bais

Melalui kegiatan pemetaan aktor (*Stakeholder*) ini, dilakukan untuk mengenal aktor-aktor dalam kaitannya dengan keberadaan dan aktifitas pelaku dalam proses pengembangan masyarakat, tidak hanya yang berpotensi untuk diajak kerjasama tetapi juga yang berpotensi untuk menghambat pelaksanaan program ke depan. Selanjutnya, jaringan hubungan antar aktor dapat dipahami setelah proses pemetaan aktor dianalisis. Adanya aktor yang memiliki pengaruh dan kepentingan dilingkungan masyarakat hampir identik dengan kelompok elite dalam lingkungan

politik. Oleh karena itu, Perlunya analisis pihak-pihak berkepentingan untuk :

- Mengenali pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya ekonomi setempat.
- Menggolongkan pihak-pihak utama terkait (formal dan informal) berdasarkan kepentingan mereka, kondisi ekonomi, kiat-kiat dan dinamika kegiatan mereka saat ini.
- Mengikuti dinamika regulasi/aturan main diantara pihak-pihak terkait dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal.
- Menganalisa perbedaan interpretasi masing-masing pihak terkait mengenai pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal.
- Menganalisis jaringan sosial diantara para *stakeholders* dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Selain dari itu, analisa pembahasan selanjutnya akan mengarah kepada sudut pandang jaringan hubungan yang terjadi antar aktor yang terdiri dari individu, kelompok dan organisasi. Jaringan hubungan antar aktor juga memiliki beberapa prinsip logis yang merupakan tempat bersandarnya pemikiran-pemikiran tentang pola hubungan jaringan itu sendiri, yaitu :

1. Ikatan antar aktor biasanya adalah simetris baik.
2. Ikatan antara individu yang harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas.
3. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur didalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas

akan terdistribusikan secara tak merata.

4. Distribusi yang tampak dari sumber daya yang terbatas menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi.
5. Terstrukturanya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan.

Jaringan sosial menjadi sangat penting di dalam masyarakat karena di dunia ini bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian dari

jaringan-jaringan hubungan sosial dari manusia lainnya. Walaupun begitu manusia tidak selalu menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu atau konteks sosialnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari aspek pemetaan aktor serta jaringan hubungan antar aktor di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih dapat diambil suatu kesimpulan tentang analisa aktornya sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Aktor Kepenghuluan Rantau Bais

No.	Nama : Individu, Kelompok/ Organisasi	Nama Aktor	Posisi Sosial	Peranan Sosial	Kekuatan Aktor
1.	Pemerintah Desa	Yusri Kandar, ST	Penghulu	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh
2.	Pemerintah Desa	H. Julizar, SE., MM	Sekretaris Desa	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh
3.	Pemerintah Desa	Juliardi, Spi	Ketua BPD/ BPKep	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh
4.	Pemerintah Desa	Afrizal	Ketua LPM	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh
5.	Pemerintah Desa	Dalius	Ketua Dusun I (Bais)	Berpengaruh pada lingkungan dusun I	Sangat berpengaruh
6.	Pemerintah Desa	Upriman	Katua Dusun II (Sono)	Berpengaruh pada lingkungan dusun II	Sangat berpengaruh
7.	Pemerintah Desa	H. Adrizam	Ketua Dusun III (Sejati)	Berpengaruh pada lingkungan dusun III	Sangat berpengaruh
8.	Pemerintah Desa	Amtisar	Ketua Dusun IV (Batang Kopau)	Berpengaruh pada lingkungan dusun IV	Sangat berpengaruh
9.	Pemerintah Desa	Nurais	Kasi. Pemerintahan	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh

10.	Pemerintah Desa	Taslim, SPd	Kasi. Kesra	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh
11.	Pemerintah Desa	Asril	Kasi. Pelayanan	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh
12.	Pemerintah Desa	Syafri	Kasi. Trantib	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh
13.	Tokoh Adat	Darwis	Ketua Pengurus Adat kemasyarakatan	Berpengaruh pada kegiatan adat kemasyarakatan	Sangat berpengaruh
14.	Tokoh Agama	H. Kholifah Mukhotib Faisal	Ketua Pengurus Keagamaan	Berpengaruh pada kegiatan keagamaan masyarakat	Sangat berpengaruh
15.	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Suyanto	Babinkamtibmas	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh
16.	Babinsa	S. Naga	Babinsa	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh
17.	PKK	Nurlaili Supriantini, S.I.Kom	Ketua PKK	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh
18.	Karang Taruna	Ardika	Ketua Organisasi Pemuda Karang Taruna	Berpengaruh pada lingkungan Organisasi Kepemudaan	Sangat berpengaruh
19.	Organisasi Pemuda	Rifki Cahyono	Pengurus Organisasi Pemuda Rantau Bais	Berpengaruh pada lingkungan Organisasi Kepemudaan	Sangat berpengaruh
20.	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Jefrinaldi	Ketua Kelompok Sadar Wisata	Berpengaruh pada lingkungan Organisasi	Sangat berpengaruh
21.	Pemerintah Desa	Rudi Zandra	Ketua BUMDes	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh pada lingkungan desa
22.	IKREMA (Ikatan Remaja Masjid)	Yusri Pratama	Ketua IKREMA	Berpengaruh pada kegiatan keagamaan masyarakat	Berpengaruh
23.	Kelompok Perwiridan	Hj. Hayati	Ketua Perwiridan Ibu-	Berpengaruh pada lingkungan	Sangat berpengaruh

			ibu	Organisasi Wirid	
24.	IPK (Ikatan Pemuda Kerja)	Dodi Ramdani	Ketua Organisasi IPK	Berpengaruh pada lingkungan Organisasi	Berpengaruh
25.	Koperasi Wanita Mandiri	Jarnimawati	Ketua Koperasi Wanita	Berpengaruh pada lingkungan koperasi	Berpengaruh
26.	Laskar Melayu Hulubalang	M. Rahman	Ketua Laskar Melayu Hulubalang	Berpengaruh pada lingkungan Organisasi	Berpengaruh
27.	Kelompok Sanggar Seni	Tengku Azmi	Ketua Kelompok Sanggar Seni	Berpengaruh pada Organisasi kelompok sanggar seni	Berpengaruh
28.	Ikatan Mahasiswa Rantau Bais	M. Afri	Ketua Ikatan Mahasiswa Rantau Bais	Berpengaruh pada Organisasi Ikatan Mahasiswa Rantau Bais	Berpengaruh
29.	Ekonomi Kreatif	Anto Probo	Pengurus Ekonomi Kreatif Rantau Bais	Berpengaruh pada Kepengurusan Ekonomi Kreatif Rantau Bais	Berpengaruh
30.	Bidan Desa	Bidan Kiki	Bidan Dusun I	Berpengaruh pada lingkungan Desa	Berpengaruh
31.	Bidan Desa	Bidan Mazdalifa	Bidan Dusun II	Berpengaruh pada lingkungan Desa	Berpengaruh
32.	Bidan Desa	Bidan Lita	Bidan Dusun III	Berpengaruh pada lingkungan Desa	Berpengaruh
33.	Bidan Desa	Bidan Seroja	Bidan Dusun IV	Berpengaruh pada lingkungan Desa	Berpengaruh

Sumber : Data olahan mandiri Desa Rantau Bais Tahun 2018

Seperti yang digambarkan pada tabel diatas maka ada beberapa kelompok dan organisasi yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Rantau Bais, dalam hal ini ada juga beberapa individu yang memiliki pengaruh untuk dapat memobilisasi anggota masyarakat, hanya saja dalam

proses penghimpunan data diawal, pihak narasumber sengaja tidak menyebutkan nama dan *contact* dengan maksud tertentu.

Oleh karena itu, hal ini kembali diluruskan untuk menjaga originalitas uraian dan pemahaman yang kami buat tanpa menghilangkan pemahaman tentang keberadaan individu-individu yang

memiliki pengaruh kuat dilingkungan masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais ini.

III.b. Pemetaan Jaringan Sosial

Pemetaan jaringan sosial dimaksudkan untuk mengetahui interaksi sosial yang berkesinambungan yang kemudian mampu membentuk satuan kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, sebagaimana dalam uraian sebelumnya dijelaskan bahwa pelaku-pelaku dalam suatu proses interaksi sosial masyarakat dapat disebut sebagai aktor. Dalam kehidupan masyarakat, aktor dapat berupa individu, kelompok maupun lembaga.

Masing-masing aktor mempunyai karakteristik dan latar belakang sosial yang berbeda, mempunyai wawasan dan orientasi berpikir yang berbeda, bahkan juga kepentingan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, interaksi antar aktor secara otomatis membawa konsekuensi interaksi antar karakteristik dan kepentingan yang melatarbelakangi masing-masing aktor.

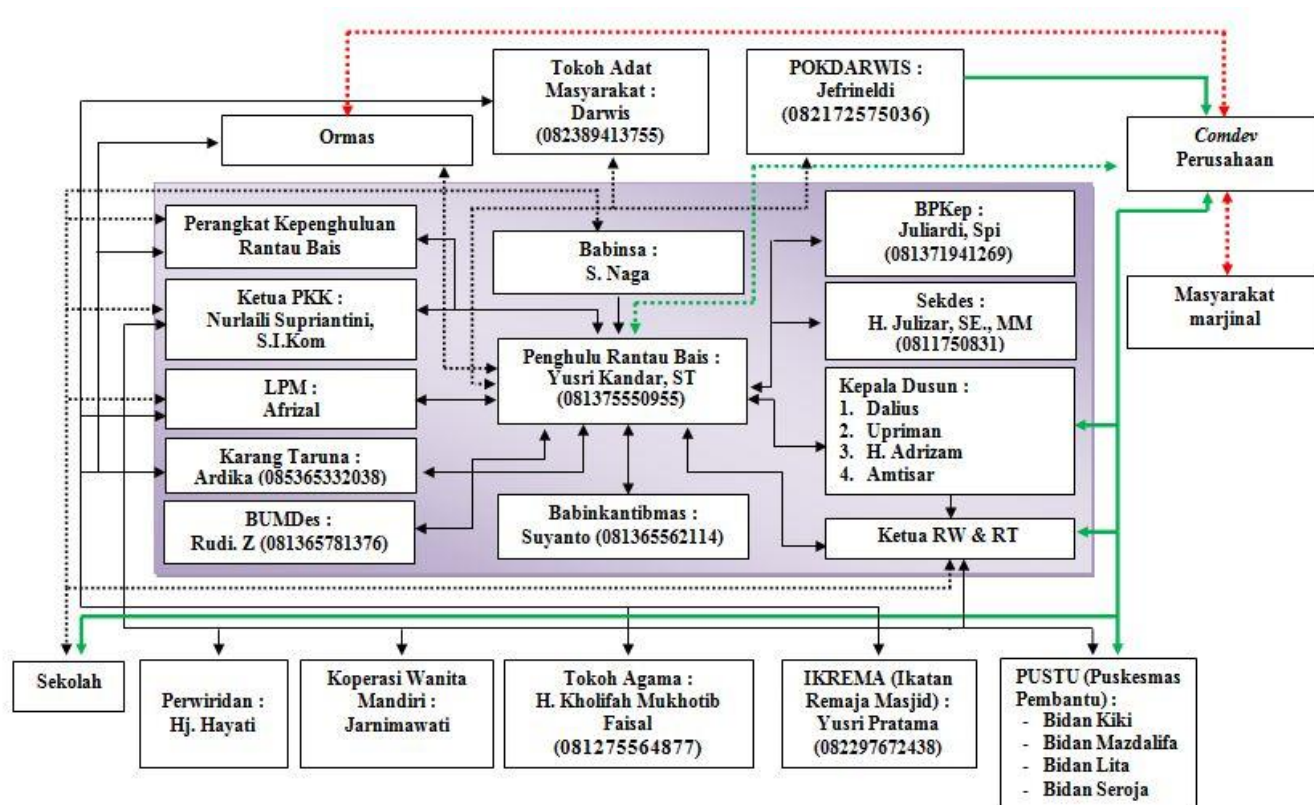
Itulah sebabnya, dalam proses kehidupan masyarakat dimungkinkan terjadinya interaksi antar kepentingan dan wawasan yang sejalan, akan tetapi juga dimungkinkan interaksi antar kepentingan yang tidak sejalan. Kesemuanya itu menyebabkan dalam proses interaksi sosial tersebut secara garis besar

menghasilkan dua bentuk hubungan *associative* dan *dissociative*, yakni :

1. Bentuk pertama berpotensi menghasilkan kerjasama dan sinergi, sementara.
2. Bentuk kedua berpotensi menghasilkan hubungan yang mengarah kepada prasangka bahkan konflik.

Pemetaan jaringan sosial harus dapat memberikan ilustrasi berbagai bentuk hubungan antar aktor dengan berbagai latar belakang baik dalam posisi sebagai individu maupun institusi, baik yang bersifat *associative* maupun *dissociative*. Sudah tentu tidak mungkin menampilkan keseluruhan aktor yang terlibat dalam kehidupan masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, dalam pemetaan tersebut dipilih aktor yang mempunyai peranan menonjol dalam kehidupan masyarakat.

Pemetaan jaringan sosial yang menggambarkan hubungan antar aktor, baik individu maupun institusi beserta sifat hubungannya, baik positif maupun negatif sebaiknya dituangkan dalam bentuk skema. Dalam hal ini, skema berikut ini merupakan penjelasan tentang pemetaan jaringan sosial yang melibatkan aktor-aktor tertentu yang dianggap menonjol dan mempengaruhi interaksi sosial lingkungan masyarakat Desa Rantau Bais.

Gambar 1. Pemetaan Jaringan Sosial Antar Aktor di Desa Rantau Bais

Keterangan :

	Berhubungan Langsung
	Ada hubungan namun tidak secara langsung
	Terdapat hubungan untuk <i>Community Development</i> tapi tidak secara langsung
	Hubungan suatu perusahaan dengan masyarakat
	Terdapat Konflik terselubung

Sumber : Data olahan mandiri Desa Rantau Bais Tahun 2018

III.b.1. Penjelasan Pemetaan Jaringan Sosial Antar Aktor Desa Rantau Bais :

1. Berhubungan secara langsung artinya masing-masing aktor dan lembaga seperti perangkat kepenghuluan, Sekdes, BPD/BPKep, PKK, LPM, Karang Taruna, Babinkamtibmas, Babinsa, BUMDes, Kepala dusun dan Ketua RW dan RT, memiliki hubungan secara langsung, baik dengan Penghulu Desa khususnya Kepenghuluan Rantau Bais maupun dengan aktor atau organisasi

pemerintahan kepenghuluan lainnya. Pola hubungan yang secara langsung tersebut terjalin berdasarkan tugas, tanggungjawab, fungsi dan kewenangan masing-masing aktor dalam struktur pemerintahan kepenghuluan rantau bais.

2. Berhubungan tidak secara langsung artinya masing-masing aktor dan kelompok masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Organisasi masyarakat, Pengurus Pustu, Sekolah dan aktor lainnya memiliki hubungan tidak

secara langsung dengan Penghulu maupun aktor Pemerintahan Kepenghuluan lainnya karena tidak ikut secara langsung dalam kepengurusan inti Pemerintah Kepenghuluan Rantau Bais, hubungan tidak secara langsung ini pada umumnya lebih bersifat komunikatif dan koordinatif saja tidak berdasarkan jenjang hirarki dalam struktur pemerintahan kepenghuluan.

3. Terdapat hubungan untuk Program *Comdev* tapi tidak secara langsung, Pemerintah Kepenghuluan Rantau Bais dilibatkan dalam menghimpun aspirasi masyarakat untuk program *Community Development (Comdev)* perusahaan, namun tidak secara langsung karena arah kebijakan untuk penetapan program *Comdev* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dari perusahaan.
4. Hubungan Perusahaan dengan masyarakat artinya dalam pola hubungan ini tetap ada keterikatan antara keberadaan suatu perusahaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.
5. Konflik terselubung, dalam pola hubungan ini pada umumnya konflik terjadi karena adanya kesenjangan antara masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada dengan keberadaan sebuah perusahaan. Hal ini biasanya disebabkan karena banyaknya aspirasi dan permintaan masyarakat yang belum terealisasi karena apabila direalisasikan justru itu dapat memberatkan program perusahaan kedepannya.

III.b.2. Penjelasan Hubungan Antar Aktor Desa Rantau Bais :

Untuk melihat pola hubungan antar aktor khususnya di kepenghuluan rantau bais dapat dijelaskan melalui beberapa kategori aktor yakni aktor inti dalam

Pemerintahan Kepenghuluan, aktor pendukung dari kelompok dan anggota masyarakat serta keberadaan *Community Development (Comdev)* Perusahaan.

Berikut ini adalah uraian pola hubungan antar aktor di kepenghuluan rantau bais :

1. Aktor inti : Penghulu, Sekretaris Desa, Perangkat Kepenghuluan, Ketua BPD/ BPKep, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, Babinkantibmas, Babinsa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT. Masing-masing aktor inti Pemerintahan Kepenghuluan Rantau Bais ini memiliki hubungan secara langsung dengan penghulu dalam struktur Pemerintahan Kepenghuluan, berdasarkan hasil penelitian dan pendataan aktor hubungan antar aktor cenderung baik dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor.
2. Aktor pendukung dari anggota masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat : Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Masyarakat, Pengurus Pustu, Koperasi Wanita, Pokdarwis dan Kelompok Perwiridan. Masing-masing aktor memiliki pola hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemerintahan Kepenghuluan dan aktor pendukung lainnya. Dalam hal ini hubungan antar aktor cenderung baik.
3. Keberadaan Perusahaan dengan program *Community Development* pada prakteknya terjadi pola hubungan tidak secara langsung dengan Pemerintah Desa dan hubungan yang secara langsung dengan masyarakat sebagai sasaran kegiatan seperti yang telah

dijelaskan melalui gambar Pemetaan Jaringan Sosial Antar Aktor Kepenghuluan Rantau Bais. Pada kenyataannya melalui pola hubungan tersebut terdapat konflik terselebung antara Perusahaan melalui program *Comdev* dengan masyarakat marjinal setempat karena banyaknya aspirasi dan permintaan masyarakat yang belum terealisasi melalui *Comdev* Perusahaan.

Kesimpulan dari hasil pemetaan aktor dan pola hubungan antar aktor di kepenghuluan rantau bais ini secara garis besar terjadi suatu pola hubungan yang cukup baik antar aktor yang terjadi dalam hubungan dan interaksi masing-masing aktor.

III.c. Deskripsi Posisi Sosial Dan Peranan Sosial Aktor Dalam Kehidupan Masyarakat

Identifikasi aktor-aktor yang memiliki posisi dan peranan sosial dalam kehidupan masyarakat dilakukan untuk merumuskan peta sosial politik dalam menentukan strategi yang akan dilakukan. Aktor-aktor kunci dapat diidentifikasi sebagai aktor pengambilan keputusan yang terlihat (*visible*), aktor-aktor yang tersembunyi (*hidden*), dan aktor-aktor yang tidak terlihat (*invisible*) namun memiliki pengaruh dalam hal pengambilan dan penentuan arah keputusan dalam lingkungan suatu masyarakat.

Aktor-aktor kunci seperti yang telah diuraikan pada tabel analisa aktor pada poin 1 (pertama) seperti Penghulu, Perangkat Kepenghuluan, Sekretaris Desa, BPD/ BPKep, LPM, Kadus, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan pemuda masuk kepada aktor yang diidentifikasi

sebagai aktor terlihat (*visible*) yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Kemudian, untuk dapat melihat sampai sejauh mana keberadaan aktor tersembunyi (*hidden*) yang memiliki pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan di Kepenghuluan Rantau Bais tidak dapat teridentifikasi karena umumnya semua aktor dalam lingkungan masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais dapat terlihat melalui pengaruh masing-masing aktor tersebut.

III.d. Identifikasi Forum-Forum Yang Menjadi Sarana Yang Digunakan Masyarakat Dalam Membahas Kepentingan Umum/ Publik

Partisipasi aktif masyarakat dalam program *Comdev* (*Community Development*) dapat dilihat dari mekanisme seperti apa yang menjadi budaya dilingkungan masyarakat tersebut dalam memecahkan persoalan tertentu, selain itu perlu juga diketahui sampai sejauh mana tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan aspirasi.

Program pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk membangun masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka hal yang paling mendasar adalah mengetahui sarana yang mereka gunakan dalam rangka peningkatan program pengembangan masyarakat tersebut khususnya pada sarana yang mereka gunakan dalam membahas aspek-aspek kepentingan umum. Identifikasi forum yang digunakan masyarakat kepenghuluan rantau bais dalam membahas kepentingan umum dapat dilihat dari penjelasan tabel berikut ini :

Tabel 4. Identifikasi Forum Masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais

No.	Nama Forum	Keanggotaan	Tempat Pelaksanaan	Frekuensi pertemuan atau Jadwal	Aktifitas (apa yang dilakukan dan dibahas dalam forum tersebut)
1.	Forum masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais	- Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD/ BPKep, Kadus dan Perangkat desa. - Organisasi keagamaan. - Organisasi masyarakat. - Organisasi pemuda. - Komponen masyarakat.	Aula kantor kepenghuluan Rantau Bais	Tidak terjadwal rutin, diadakan ketika diperlukan saja.	Musyawarah atas kegiatan kepenghuluan rantau bais.
2.	Forum Adat Masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais.	- Pemerintahan Kepenghuluan Rantau Bais. - Masyarakat Adat.	Rumah Warga	Tidak terjadwal rutin, umumnya diadakan ketika ada acara pernikahan warga.	Musyawarah warga masyarakat kepenghuluan rantau bais.
3.	Forum agama masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais.	Seluruh masyarakat kepenghuluan rantau bais berdasarkan agama.	- Masjid/ rumah ibadah.	Tidak terjadwal rutin, diadakan ketika diperlukan saja.	Penjelasan pokok bahasan serta diskusi.
4.	Forum IKREMA (Ikatan Remaja Masjid)	- Tokoh Agama - Perangkat Kepenghuluan - Pemuda/i Kepenghuluan Rantau Bais.	- Masjid	Tidak terjadwal rutin, diadakan ketika menyambut perayaan hari besar umat islam	Musyawarah warga dalam merencanakan kegiatan perayaan hari besar umat islam.
5.	Perwiridan Ibu-ibu	- Ibu-ibu warga Kepenghuluan Rantau Bais.	- Rumah Perwiridan atau Rumah Warga.	Seminggu sekali	Pengajian dan musyawarah ibu-ibu kepenghuluan rantau bais.
6.	Arisan Pemuda Kepenghuluan Rantau Bais.	- Pemuda/i Kepenghuluan Rantau Bais.	- Masjid atau rumah warga.	Sebulan sekali	Pengajian dan musyawarah pemuda/i kepenghuluan rantau bais.

Sumber : Data olahan Desa Rantau Bais Tahun 2018

Selain melalui forum-forum yang diadakan oleh masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais dalam membahas suatu permasalahan umum ini, maka ada pula sarana lainnya bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi yakni melalui kegiatan gotong royong yang digagas secara bersama-sama. Meskipun kegiatan ini tidak terjadwal rutin namun melalui kegiatan gotong royong disekitar lingkungan Kepenghuluan Rantau Bais ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling bertemu dan berkumpul bersama serta memanfaatkan waktu kebersamaan tersebut untuk sedikit membahas persoalan-persoalan disekitar lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya penetapan suatu kebijakan yang bersifat mengikat terutama yang berbentuk kebijakan publik yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan tidak harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak, karena pada dasarnya penetapan suatu kebijakan adalah hal yang lumrah bila ada yang setuju ataupun tidak, namun yang jelas kebijakan yang dihasilkan harus memiliki tujuan untuk kebaikan bersama.

Setiap kebijakan yang dihasilkan akan dilegitimasi oleh pihak terkait, namun proses pembuatan kebijakan tentunya perlu mendapat perhatian khusus bagi para akademisi untuk melihat lebih jauh bagaimana suatu kebijakan tersebut dihasilkan. Pada kenyataannya suatu kebijakan dapat dihasilkan setelah melalui berbagai proses tawar dan negosiasi dari berbagai pihak yang memiliki kekuatan dan kepentingan.

Hal ini dikarenakan setiap aktor memiliki jaringan sosial artinya setiap personal dan kelompok masyarakat yang ada saling terkait dalam suatu hubungan sosial maupun politis. Aktor utama yang memiliki pengaruh terhadap suatu

kebijakan merupakan aktor yang termasuk dalam jaringan struktural suatu instansi, namun aktor yang memiliki pengaruh kuat dan kepentingan yang tinggi bisa saja berasal dari luar jaringan struktural, itu bisa diakibatkan karena status sosial yang mereka miliki, dengan pengaruh itulah kemudian aktor-aktor secara personal maupun berkelompok ini mampu turut memberikan pengaruh kepada aktor jaringan struktural dalam penetapan suatu kebijakan.

Hal yang paling penting dalam suatu penetapan kebijakan adalah perencanaan dan analisa yang matang untuk memprediksi resiko yang terjadi dimasa yang akan datang terhadap suatu persoalan tertentu dan selanjutnya setiap kebijakan yang dibuat diharapkan mampu memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat.

Proses tawar-menawar sebelum kebijakan ditetapkan merupakan hal yang biasa karena itulah kemudian musyawarah dilingkungan masyarakat perlu diadakan untuk memperoleh suatu mufakat.

Hal yang perlu dihindari adalah dominasi aktor karena kekuatan dan kepentingan yang dimiliki lantas memobilisasi dan mengarahkan kebijakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu perlunya sinergitas dan keseimbangan antara aktor yang memiliki derajat kekuatan dan kepentingan yang tinggi dengan aktor-aktor lainnya.

Selain itu juga perlunya keseimbangan kekuatan dan kepentingan dari beragam aktor yang ada baik itu aktor utama dalam jaringan struktural maupun aktor yang berasal dari luar jaringan struktural, hal ini bisa diwujudkan dengan komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis antara masing-masing aktor.

Untuk itu perlunya forum-forum rutin yang bisa diselenggarakan oleh aktor utama dalam rangka menjaga hubungan

tersebut dengan melibatkan semua kalangan dan elemen dalam menanggapi setiap persoalan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara

_____. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Almond, Gabriel dan G Bingham Powell Jr. (1966). *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston : Little Brown

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta

Buku laporan Studi Pemetaan Sosial dan Pemangku Kepentingan PT. Pertamina Hulu Energi Siak. 2018. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIA-Indragiri

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Islamy, M. Irgan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika

_____. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika

Kecamatan Tanah Putih Dalam Angka Tahun 2017 (Badan Pusat Statistik)

Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : PT.

Kencana Perdana

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia

_____. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia

_____. 2016. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Profil Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2017

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

_____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Data Wawancara

Julizar (Sekretaris Desa). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Nurais (Kasi Pemerintahan). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Taslim (Kasi Kesra). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Darwis (Tokoh Adat). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Jefrinaldi (Tokoh Pemuda). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Faisal, K. Mukhotib (Tokoh Agama). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Suyanto (Babinkamtibmas). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Rifki Cahyono (Tokoh Pemuda). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Bidan Kiki (Bidan Dusun I). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Asril (Kasi Pelayanan). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Mazdalifah (Bidan Dusun II). 2018. Wawancara “Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri” Di Kantor Desa Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir

Data Olahan

Data Olahan Mandiri Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Desa Rantau Bais Tahun 2017

Data Olahan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Rantau Bais Tahun 2017

Data Olahan Mandiri Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Desa Rantau Bais Tahun 2017

Data Olahan Mandiri Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa Rantau Bais Tahun 2017

Data Olahan Mandiri Identifikasi Forum Masyarakat Desa Rantau Bais Tahun 2017

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa